

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Pada hakikatnya politik identitas merupakan politik humanis yang memperjuangkan hak-hak manusia untuk diakui demi adanya kesetaraan, kebebasan dan keadilan di dalam masyarakat. Namun demikian, seiring perkembangan jaman dengan perubahan sistem pemerintahan yang lebih modern serta adanya kemajuan teknologi, praktik politik identitas bukan lagi mempraktikkan politik yang humanis memperjuangkan hak-hak asasi manusia, melainkan berubah menjadi suatu gerakan politik untuk memperjuangkan kekuasaan di dalam pemerintahan. Praktik politik identitas merupakan fenomena global kontemporer termasuk di Indonesia. Dalam hal ini, di Indonesia praktik politik yang berbasis pada identitas agama berpotensi melahirkan konflik, fanatisme, diskriminasi, rasisme yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa.

Di dalam sejarah bangsa Indonesia praktik politik identitas berbasis agama sudah dan sedang menghantui demokrasi Pancasila. Dalam konteks politik Indonesia, praktik politik identitas agama telah menjadi ancaman serius bagi sistem demokrasi Pancasila. Narasi politik identitas berbasis agama dijadikan alat politik oleh elit-elit penguasa untuk mengartikulasikan kepentingan kelompoknya. Oleh karena itu, pada tingkat masyarakat, praktik politik identitas agama berdampak pada polarisasi masyarakat. Masyarakat akan menjadi terfragmentasi oleh karena kepentingan-kepentingan agama didahulukan di atas kepentingan politiknya. Masyarakat yang terpolarisasi tersebut akan menyebabkan perpecahan yang juga dapat mengakibatkan demokrasi Pancasila mengalami kemunduran.

Bahaya dari praktik politik identitas agama di Indonesia ialah dapat menghilangkan pluralitas bangsa Indonesia. Politik identitas agama tidak memberi ruang kepada pluralitas yang menandai jati diri bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan agama sendiri yang mengendalikan ruang politik. Agama seharusnya menjadi pengajar

yang baik dalam pembentukan moral, namun seringkali agama dijadikan alat politik untuk meraih kekuasaan tertentu di dalam negara Indonesia. Gerakan politik identitas agama akan berujung pada hancurnya sistem demokrasi pada umumnya dan ideologi Pancasila pada khususnya. Oleh karena itu, Politik identitas yang berbasis agama memiliki kecenderungan menghilangkan prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila di Indonesia.

Keberadaan agama di Indonesia turut membantu penguatan citra identitas di dalam perpolitikan. Penguatan citra identitas agama di dalam politik pada akhirnya menjadi agresif untuk mendapatkan kekuasaan di dalam pemerintahan. Dalam upaya untuk menghilangkan politik identitas yang berbasis agama di Indonesia ada beberapa hal yang perlu digalakkan. *Pertama*, pemaknaan kebhinnekaan bangsa Indonesia yang bernuansa apresiatif, toleran, egaliter, dan akomodatif. Merefleksikan kembali gagasan tentang Pancasila merupakan sebuah langkah untuk menata ulang sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mampu mengatasi masalah-masalah yang mengancam keutuhan negara Indonesia termasuk praktik politik identitas agama.

*Kedua*, pendidikan politik yang memadai. Pendidikan politik sangat urgen diperlukan bagi masyarakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses politik serta dampaknya, serta untuk menekan adanya praktik politik identitas dengan isu agama. Pendidikan politik bagi masyarakat tidak semestinya dilakukan dalam bentuk pengajaran, namun bisa juga melalui sosialisasi tentang bagaimana berpolitik yang baik di dalam negara Indonesia yang plural. *Ketiga*, peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting dalam sukses atau gagalnya penerapan demokrasi di suatu negara. Pemerintah dan masyarakat dituntut untuk hidup berdampingan dalam mengawal perjalanan demokrasi. Apabila perjalanan demokrasi suatu negara sukses, hal tersebut merupakan kesuksesan kolektif antara pemerintah dan masyarakat. Jika perjalanan demokrasi suatu negara terbengkalai, itu merupakan kegagalan kolektif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai pedoman hidup sekaligus

menjiwai seluruh praktik kekuasaan (politik) dalam rangka perwujudan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengakuan terhadap Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia berarti cara pikir, bertindak, dan bersikap semestinya mencerminkan nilai Pancasila di dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga menuntut perbuatan baik dari elite-elit politik penyelenggara negara maupun masyarakat Indonesia pada umumnya dituntut untuk mengamalkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apabila nilai-nilai etis yang tertuang di dalam sila Pancasila itu diamankan dengan sungguh-sungguh, maka negara Indonesia terhindar dari praktik politik identitas yang berbasis agama.

## 4.2 USUL DAN SARAN

### 4.2.1 Para Pemimpin Politik

Tindakan kekerasan dengan alasan atau motif apapun, termasuk tindakan kekerasan atas nama agama merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran HAM. Hal ini termaktub di dalam Pasal 5 Deklarasi Universal HAM, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999; Pasal 8 dan 9 UU No. 26 Tahun 2000. Negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan HAM, dalam konteksnya sebagai negara berkeadilan. Ada tiga kewajiban utama negara berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia dan tindakan kekerasan. Kewajiban ini termaktub di dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan bahwa, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

*Pertama*, kewajiban untuk menghormati. Kewajiban ini menuntut negara, agar menjamin integritas individu ataupun kelompok demi tercapainya kebebasan, sehingga terhindar dari tindak kekerasan. *Kedua*, kewajiban untuk melindungi. Kewajiban ini digunakan untuk melindungi warga negara dari pelanggaran terhadap hak-hak individu, termasuk mencegah pelanggaran terhadap kebebasan manusia tersebut. *Ketiga*, kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban ini menuntut negara untuk

menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya dengan memberi kepuasan di dalam instrumen hak asasi manusia di dalam negara.

Dengan merujuk pada tiga kewajiban esensial negara di atas, maka segala bentuk tindakan yang mengancam keutuhan negara demokrasi di Indonesia termasuk praktik politik identitas agama, seharusnya merupakan tanggung jawab negara untuk mengatasi dan mencegah persoalan tersebut. Namun yang terjadi di Indonesia, praktik politik identitas agama terus mengalami perkembangan, terlebih khusus pada ajang perhelatan pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima (5) tahun sekali. Elit-elit politik menggunakan jabatan dan kebebasannya dengan memasukkan ideologi agama tertentu dalam agenda politiknya. Hal ini mengindikasikan bahwa absennya negara di dalam kewajibannya untuk melindungi diri dari ancaman disintegrasi bangsa. Pemimpin politik melalui negara seharusnya hadir sebagai benteng untuk melindungi Pancasila dari segala bentuk ancaman. Menjamin keutuhan Pancasila sebagai dasar negara, berarti menjamin keberadaan demokrasi di Indonesia. Pemimpin negara diharapkan memiliki sikap yang tegas dan berani untuk menentang praktik politik identitas agama demi terciptanya demokrasi yang damai.

#### 4.2.2 Pemimpin Agama

Para pemimpin agama memiliki peran yang sangat penting dalam merajut kerukunan hidup beragama, baik itu berhadapan dengan agama-agama lain maupun peran agama itu sendiri di dalam negara. Pemimpin agama memberikan teladan hidup yang baik di dalam tutur kata dan tindakannya di tengah masyarakat. Pemimpin agama memiliki hak otoritas untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Sebagai seorang figur publik, seluruh ajaran yang diajarkan oleh pemimpin agama memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama menjadi sumber moral bagi kehidupan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat plural di Indonesia, pemimpin agama diharapkan menanamkan nilai-nilai yang baik secara universal kepada masyarakat. Hal ini

bertujuan agar negara Indonesia semakin kuat di tengah pluralitas yang ada. Namun, kerap kali di Indonesia antara urusan agama dan negara seringkali mengalami benturan. Nilai-nilai serta ajaran moral yang berasal dari agama seringkali digunakan sebagai ideologi tertentu di dalam politik. Masuknya agama di dalam politik praktis akan berdampak buruk bagi pluralitas bangsa.

Suara yang keluar dari mulut seorang pemimpin agama merupakan suara kenabian. Karya pewartaan mereka bersifat profetis. Dengan pewartaan kenabian, pemimpin agama semestinya menunjukkan dan mengajarkan prinsip hidup yang toleran, demokratis dan berkeadilan. Seorang pemimpin agama memahami batas-batas tanggung jawabnya, ia mampu membedakan yang mana urusan agama dan mana urusan negara. Oleh karena itu, pemimpin agama mesti bersikap arif dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengedukasi umat beragama agar tercipta kerukunan dan kedamaian di antara umat beragama. Demi kerukunan hidup beragama, para pemimpin agama harus mengambil suatu inisiatif untuk melakukan dialog antar agama. Dialog itu perlu agar masing-masing agama merefleksikan ajaran mereka dan menyadari bahwa ajaran asli mereka tidak memuat permusuhan terhadap orang-orang yang beragama lain.

#### 4.2.3 Lembaga-Lembaga Pendidikan

Secara sederhana lembaga pendidikan diartikan sebagai tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan dari seorang individu manusia dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik melalui proses interaksi sosial dengan sesamanya maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Dalam hal ini, lingkungan pendidikan berfungsi menunjang proses belajar dan mengajar, agar terciptanya rasa nyaman, tertib, serta berkelanjutan. Lembaga pendidikan juga merupakan badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan dan keahlian. Oleh karena itu, pendidikan seringkali diartikan

sebagai institusi sosial masyarakat. Lembaga pendidikan menawarkan suatu pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi yang bersifat umum atau khusus. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat secara lebih luas.

Dengan melihat tujuan dari pendidikan, peran lembaga pendidikan menjadi sangat urgen untuk mencetak manusia-manusia yang bermutu dan berwawasan luas. Negara membutuhkan orang-orang yang berwawasan luas untuk dijadikan figur-figur publik supaya bisa berkompeten untuk menjadi seorang pemimpin. Salah satu peran lembaga pendidikan sebagai salah satu alternatif untuk membangun bangsa dan negara ialah memupuk manusia dengan ajaran moral yang baik dan juga berpengetahuan yang benar. Apabila lembaga pendidikan gagal menanamkan moral yang baik dan pengetahuan yang benar, maka akan berpengaruh pada kemajuan negara. Adanya ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok tertentu seperti radikalisme agama, intoleransi dan praktik politik identitas agama diyakini merupakan kegagalan peran dari lembaga pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan dari sebuah lembaga pendidikan harus dibuktikan dengan melantangkan suara kebenaran.

#### 4.2.4 Media Massa

Pers dan media massa memiliki peran yang sangat vital di dalam negara demokrasi. Hal ini sejalan dengan tugasnya untuk membantu proses demokratisasi dalam sebuah negara. Pers dan media massa dilihat sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai penyaji informasi, pers dan media massa, diharapkan menjaga netralitas, independensi, dan obyektivitas. Ketiga hal ini bertujuan agar informasi yang diberikan benar-benar objektif dan proporsional. Dengan kata lain, berita dan informasi yang disajikan oleh media, benar-benar terjadi dan harus memenuhi rasa netralitas dan keadilan di dalam masyarakat. Media massa juga memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat secara luas terutama dampak dan bahaya politik identitas agama bagi keutuhan demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi amat penting untuk melindungi negara dari ancaman disintegrasi bangsa. Pemberitaan

yang benar dan edukatif dari media tentunya dapat meminimalisasi tindakan-tindakan yang memecah-belah bangsa.

#### 4.2.5 Partai Politik

Partai politik mempunyai peran yang sangat penting di dalam negara yang menganut paham demokrasi. Kemultipartaian yang ada di Indonesia merupakan bentuk dari pengakuan akan keanekaragaman sebuah tatanan masyarakat moderen dan berstruktur kompleks. Partai politik memiliki kemampuan dengan kapasitasnya sebagai salah satu atribut dari sistem demokrasi yang memiliki peran untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang di mana negara Indonesia memiliki struktur masyarakat yang sangat kompleks. Negara Indonesia memiliki struktur masyarakat yang sangat kompleks, maka dengan begitu keberadaan partai politik semakin urgen diperlukan sebagai aspirasi dan penyalur partisipasi politik masyarakat. Aspirasi masyarakat diajukan kepada partai politik, kemudian aspirasi tersebut dibahas di dalam program dan agenda partai politik tersebut.

Dalam konteks kehidupan bangsa dan negara Indonesia, ancaman serta bahaya praktik politik identitas agama terhadap demokrasi Pancasila tidak bisa dielakan begitu saja. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, praktik politik identitas yang berbasis agama begitu kuat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan massa. Nilai serta doktrin agama dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Hal inilah yang justru merusak tatanan demokrasi Pancasila. Akhir-akhir ini elit-elit politik memanfaatkan agama di dalam partai-partai politik mereka. Ada juga elit politik yang mendirikan partai politiknya dengan melandaskan ideologi agama tertentu.

Untuk mengatasi persoalan seperti ini, peran partai politik sangatlah penting. Bukan hanya menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi lebih dari itu partai politik juga mencegah terjadinya praktik politik identitas agama di Indonesia. Partai politik menjadi lembaga independen yang berani menghilangkan praktik politik identitas agama di dalam kehidupan bermasyarakat. Peran partai politik yaitu menganyomi seluruh perbedaan yang ada di dalam masyarakat, tanpa melihat identitas

agama yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan tujuan partai politik mengatasi adanya praktik politik identitas yang berbasis agama.

#### 4.2.6 Lembaga Swadaya Masyarakat

Pada hakekatnya untuk membangun sebuah bangsa yang lebih demokratis dapat dicapai melalui sebuah proses yang diawali dengan adanya kesadaran masyarakat akan suatu cita-cita dan tujuan yang sama untuk membangun negara. Cita-cita tersebut demi kepentingan bersama dan hanya dapat terealisasi apabila sekelompok orang tersebut membentuk sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Organisasi-organisasi itu lebih dikenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang mempunyai peran sangat penting dalam upaya merajut demokrasi yang ideal. Terkadang keberadaan LSM di tengah masyarakat dipandang sebelah mata karena dianggap sebagai persekutuan eksklusif, tidak bekerja sesuai dengan porsinya. Bahkan tidak jarang LSM menjadi bagian tersendiri yang terkadang dianggap mengkhawatirkan dan berpotensi menjadi faktor instabilitas nasional dari keutuhan sebuah bangsa. Sebagai contoh LSM dapat memicu munculnya sentimen kedaerahan dan separatisme yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Dalam hal ini LSM semestinya dapat menjadi elemen penting untuk memperteguh tegaknya supremasi hukum dan menjaga keutuhan Indonesia. Sudah seharusnya sebuah Ormas dapat dipandang dan dijadikan sebagai mitra strategis dalam menjalin tali kebhinnekaan yang telah lama ada. Oleh karena itu LSM yang banyak memiliki anggota elit politik, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat yang berpartisipasi, mempunyai kewajiban untuk aktif mewujudkan integrasi sosial menurut hukum, serta menjalin kerjasama yang berkesinambungan antar masyarakat, kelompok etnis, agama, dan unsur-unsur masyarakat lainnya menurut visi dan misi yang telah ditentukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### KAMUS, DOKUMEN, DAN INSTITUSI

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018.

Bagus, Lorens *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2005.

Pusat Dokumentasi ELSAM, *Deklarasi Prinsip-Prinsip Tentang Toleransi Di Umumkan Dan Ditandatangani Oleh Negara-Negara Anggota Unesco Pada 16 November 1995*, Jakarta: Dokumentasi ELSAM, 1995.

JDIH BPK RI Database Praturan, *Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia*, Jakarta: JDIH BPK RI, 1999.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2002.

### BUKU-BUKU

Afala Machdani, La Ode. *Politik Identitas Di Indonesia*, Malang: Penerbit UB Press, 2020.

Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Arifin, Anwar. *Perpektif Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2015.

Aristoteles. *Politik*. Terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2017.

As'ad. *Politik Identitas dan Gerakan Sosial Islam (Studi Atas Front Pembela Islam)*. Tangerang: Penerbit Transwacana Press, 2016.

Azra, Azyumardi *Indonesia Bertahan Dari Mendirikan Negara Hingga Merayakan Demokrasi* Jakarta: Kompas, 2020.

Baghi, Felix, ed. *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

- Bakry, Suryadi Umar. *Multikulturalisme dan Politik Identitas dalam Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Bhaghi, Keo Silvano. *Negara Bukan-Bukan? Driyarkara tentang Pancasila dan Persoalan Relasi antara Agama dan Negara*. Maumere: Penerbit Ledalero 2016.
- Buchari, Astuti Sri. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Penerbit yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Penerj. Rahman Zainuddin. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Datus, Arcy Deo. *Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013
- Dja'far, Alamsyah M. *Intoleransi Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: Penerbit Kompas Gramedia, 2018.
- Fachrian, Muhammad Rifqi. *Toleransi Antarumat Beragama Dalam Al-qur'an Telaah Konsep Pendidikan Islam*. Depok: Penerbit Rajawali Pers, 2018.
- Fukuyama, Francis. *Identitas; Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian, penerj*. Wisnu Prasetya Utama, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2018.
- Geertz. C. *Interpretation Of Culture*. New York: Publishehers Basic Books Inc, 1973.
- Habbodin, Muhtar dan Aswin Ariyanto Azis. *Revitalisasi Politik Identitas Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013.
- Hendropuspito, D. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1984.
- Hiplunudin, Agus. *Politik Identitas Di Indonesia; Dari Zaman Kolonialis Belanda Hingga Reformasi Edisi 2*. Yogyakarta: Penerbit Suluh Media, 2019.
- Jehalut, Ferdi. *Paradoks Demokrasi Telaah Analitis dan Kritik atas Pemikiran Chantal Mouffe*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai 2020.
- Klinken G. Van. *Perang Kota Kecil; Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor 2007.
- Koten, Philipus Panda. *Pendekatan Reduksionis Terhadap Agama*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Kusumaatmadja, Sarwono. *Politik dan Kebebasan*, Depok: Penerbit Koekoesan, 2007

- Maarif, Syafii Ahmad. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina, 2010.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik, Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Meyer, Thomas. *Demokrasi: Sebuah Pengantar untuk Penerapan*. Terj. Aruli Abdul dan Aleksius Jemadu. Jakarta: Penerbit Friederich Ebert Stiftung, 2003.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Penerbit Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2019.
- Parekh, Bikhu, “*Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*”. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.
- Pureklolon, T. Thomas. *Demokrasi dan Politik Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya, dan Pancasila*. Malang: Intrans Publishing 2019.
- Rais, M. Amin. *Demokrasi Dan Proses Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986.
- Riswan, Arif Munandar. *Khazanah Buku Pintar Islam 1*, Bandung: Penerbit Mizan Pustaka, 2017.
- Rozi, Syafuan dkk. *Politik Identitas Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali, dan Papua*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2019.
- Samover A. Larry, et al. *Communication Between Cultures*. [t. kta] Publisher: Cengage Learning, 2009.
- Schattschneider, E.E *Party Government* (New York: Holt Rine hart and Winston, 1942)
- Sularto, St. *Visi Dan Agenda Reformasi Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999.
- Suseno, Franz-Magnis. *Pluralisme, dalam Kebangsaan, Demokrasi dan Pluralisme. Bunga Rampai Etika Politik Aktual*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2015.

----- *Mencari Sosok Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1995.

Syarifuddin. *Filsafat Agama Budi Pekerti dan Toleransi Nilai-Nilai Moderasi Beragama*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.

Yulianeta. *Ideologi Gender Dalam Novel Indonesia Era Reformasi*. Malang: Intrans Publishing, 2021.

### **ARTIKEL DALAM BUKU YANG DIEDIT**

Chaplin, Chris. "Islam, Demokrasi dan Penciptaan Identitas Mayoritas Muslim di Indonesia Pada Abad ke-21", dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiarti dan Herlambang P Wiratraman, (ed), *Demokrasi Tanpa Demos* Semarang: LP3ES, 2020.

Noor, Firman "*Partai dan Kemunduran Demokrasi: Identifikasi Penyebab dan Usulan Solusi*" dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, Herlambang P Wiratraman (ed.), *Demokrasi Tanpa Demos* Semarang: LP3ES, 2020.

Pamungkas, Cahyo. "Demokrasi dan Masa Depan Konflik di Indonesia", dalam dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiarti dan Herlambang P Wiratraman, (ed), *Demokrasi Tanpa Demos* Semarang: LP3ES, 2020.

Paterson, Daniel. "Penodaan Agama dan Ketertiban Umum di Indonesia Kontemporer" dalam dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiarti dan Herlambang P Wiratraman, (ed), *Demokrasi Tanpa Demos* Semarang: LP3ES, 2020.

### **JURNAL**

Adam, Fahmi Yusril "Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia Nalar", *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 6:2 Desember 2022.

Al-Farisi, Leli Salman, "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila", *Jurnal Aspirasi*, 2018.

Ardipandanto, Aryojati, "The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective", *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 11:1, 2020.

- Dewantara, Agustinus Wisnu, "Radikalisme Agama Dalam Konteks Indonesia yang Agamais dan Ber Pancasila", *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 19:1 April 2019.
- Habibi, Muhammad, "Analisis Politik Identitas Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda*, 2017.
- Harahap, Fitri, "Politik Identitas Berbasis Agama", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, Mei 2014.
- Iftitah, Naili Rohma, "Islam dan Demokrasi", *Islamuna Jurnal Studi Islam*, 1:1 Juni 2014.
- Jenahan, Gregorius. "Relevansi Tuntutan Persamaan Dalam Demokrasi", *Seri VOX*, 40:4
- Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. "*Jurnal Kewarganegaraan*", 19:2, November 2012.
- Kauffman, L.A, "The Anti Politics Of Identity", *Socialist Review Journal*, 1:20 March 1990.
- Mahpudin, "Demokrasi dan Kabangkitan Politik Identitas: Refleski Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru". *International Journal of Demos (IJD)*, 1:1, April 2019.
- Mubarok, Husni, "Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia", *Jurnal Bima Islam*, 11:11, 2018.
- Muhtadi, Burhanuddin "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional", *Jurnal Maarif Institute*, 13:2 Desember 2018.
- Muthohirin, Nafik, "Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6:1, 2019.
- Nasrudin, Juhana, "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)" *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1:1, 2018.
- Nego, Obet "Teologi Multikultural sebagai Respon terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas di Indonesia", *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 16: 2, November 2020.

- Paralihan, Hotmatua, “Hubungan antara Islam dan Demokrasi (Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan di Indonesia)”, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 10:1, 2019.
- Romli, Lili “Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia,”. *Jurnal Politik Indonesia*, 4:1, 2019.
- Sari, Endang 2016. “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur” Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2:2, 2016.
- Saleh, Nur. “Abdul Kalam Azad:Nasionalisme India”. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVI No. 2, Juli 2010
- Snanfi, Leonardo Ferdinandus, Muhadjir Darwin, Setiadi, dan Hakimul Ikhwan “Politik Identitas Etnik Asli Papua Berkontestasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Sorong”, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 20: 2, Juli 2018.
- Suaib Amin Pranowo, Idham, “Pilkada, Politik Identitas dan Kekerasan Budaya”, *Jurnal Renaissance*, 5:2, Agustus 2020.
- Suseno, Magnis-Franz “Politik Identitas? Renungan Tentang Makna Kebangsaan”, *Jurnal Istitute Maarif*, 13:2, Desember 2018.
- Widjaja, Paulus S, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, Imanuel Geovaski “Politik Identitas dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik”, *Jurnal Gema Teologika*, 6:1 April 2021.
- Zahrotunnimah, “Keniscayaan Politik Identitas Dari Suatu Bangsa dan Agama”, *Jurnal ADALAH Buletin Hukum Dan Buletin*, 4:2, 2020.
- Yuanuarius Sonlay, “Diskursus Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia”, dalam *AKADEMIKA Ledalero*, 7:2 Ledalero, 2013-2014.

## **SKRIPSI**

- Yulianti, Yuli. “Politik Identitas Etnis Sebagai Bentuk Dari Ikatan Primordialisme Dalam Sistem Politik Di Kalimantan Barat Studi Kasus: Pemilihan Bupati Sintang Tahun 1994”. Skripsi, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 2013.

## INTERNET DAN ACARA TELEVISI

Badan Pusat Statistik (BPS), “Statistik Indonesia 2010 ”.

<https://www.bps.go.id/publication/2010/12/23/statistik-indonesia-2010.html>

Bharoto “Politik Identitas” dalam *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/06/politik-identitas>

Bhaskara, Adhi L “Survei Komnas HAM: Diskriminasi Etnis dan Ras Masih Terus Ditolerir” dalam *tirto.id*, <https://tirto.id/Survei-Komnas-Ham-Diskriminasi-Etnis-Ras-masih-terus-ditolerir-tirto.id>.

Elysa, Ratih “Benarkah Politik Identitas Agama Pengaruhi Terwujudnya Demokrasi Liar?”.

[https://www.kompasiana.com/ratih72694/6079b284d541df5d1a4ece92/benarkah-politik-identitas-agama-pengaruhi-terwujudnya-demokrasi-liar?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/ratih72694/6079b284d541df5d1a4ece92/benarkah-politik-identitas-agama-pengaruhi-terwujudnya-demokrasi-liar?page=1&page_images=1).

Ilmisani, Radendy Ahmad “Asal Muasal Politik Identitas Menggunakan Jubah Islam”. <https://kumparan.com/radendy-ahmad-ilmisani/asal-muasal-politik-identitas-menggunakan-jubah-islam-1yFbLOLy7b0/full>.

Kevias, Gabriella “Intoleransi Beragama di Indonesia”. Intoleransi Beragama di Indonesia Halaman 2 - [Kompasiana.com/gkevias23/61a3b7a906310e1a93390e72/intoleransi-beragama-di-indonesia?page=all](https://www.kompasiana.com/gkevias23/61a3b7a906310e1a93390e72/intoleransi-beragama-di-indonesia?page=all),

Knight, Benjamin “Yang Anda Perlu Tahu Tentang Partai Politik Jerman”. <https://www.dw.com/id/yang-perlu-anda-ketahui-tentang-partai-di-jerman/a-39162807>.

Krishnan, Murali “Pemerintah India Mau Nilai-Nilai Hindu Jadi Ideologi Negara” dalam *Made For Minds*, <https://www.dw.com/id/pemerintah-india-mau-nilai-nilai-hindu-jadi-ideologi-negara/a-60856452>.

Kusumaningrum, Hesty “Sebenarnya Apasih Radikalisme Agama Itu?”.

<https://www.kompasiana.com/hesty-kusumaningrum/5535a8756ea8346b18da42d9>.

Prabowo, Gama “Konflik Pattani di Thailand”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/142320669/konflik-pattani-di-thailand>.

“Pilpres 2024; Mengapa Partai Ummat gaungkan Politik Identitas” dalam *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14nxqz57jqo>.

Verry, Valentino “Anis Baswedan Berpotensi Mainkan Politik Identitas di Pilpres 2024, karena Mesra Dengan Garis Keras”, dalam *wartakota.tribunnews.com*, [https://wartakota.tribunnews.com](https://wartakota.tribunnews.com/2023/03/01/anis-baswedan-berpotensi-mainkan-politik-identitas-di-pilpres-2024-karena-mesra-dengan-garis-keras), Anis Baswedan Berpotensi Mainkan Politik Identitas di Pilpres 2024, karena Mesra Dengan Garis Keras.

“Was-Was Politik Identitas” Kompas TV. Host Andreas Hugo Pareira. 1 Maret. 2023.

Yunus, Syarif “Hoaks dan Ujaran Kebencian, Bukti Rendahnya Literasi Politik Masyarakat”. <https://www.kompasiana.com/syarif1970/5dcde419d541df131b4e8824/hoaks-dan-ujaran-kebencian-bukti-rendahnya-literasi-politik-masyarakat>.